



Penerapan Nilai dan Norma Global Melalui Model Penta-Helix dalam Respons Terhadap Bencana Non-Alam: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Hubungan Internasional

Akmal Auliya

Universitas Paramadina, Indonesia

Email: akmal.auliya@students.paramadina.ac.id

Kata Kunci

Tragedi Kanjuruhan; Bencana Non-Alam; Penta-Helix; Norma Global; Hubungan Internasional

Abstrak

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menyoroti kegagalan sistemik dalam pengelolaan bencana non-alam di sektor olahraga Indonesia. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai dan norma global—seperti keselamatan publik, hak asasi manusia, dan akuntabilitas—melalui model Penta-Helix yang melibatkan peran pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan sektor swasta. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap laporan resmi, regulasi internasional, publikasi akademis, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma global telah diadopsi secara formal, implementasinya di tingkat nasional menghadapi hambatan signifikan, termasuk koordinasi yang lemah antaraktor, penegakan regulasi yang tidak konsisten, dan rendahnya akuntabilitas. Tragedi ini tidak hanya mengekspos kegagalan tata kelola domestik, tetapi juga merusak reputasi internasional Indonesia, khususnya dalam diplomasi olahraga. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai global ke dalam kebijakan lokal melalui kolaborasi Penta-Helix yang inklusif dan transparan merupakan kebutuhan mendesak. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas stakeholder, dan reformasi tata kelola bencana yang selaras dengan standar internasional untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Keywords

Kanjuruhan Tragedy; Non-Natural Disaster; Penta-Helix; Global Norms; International Relations

Abstract

The Kanjuruhan Tragedy on October 1, 2022, highlighted the systemic failure in managing non-natural disasters in Indonesia's sports sector. This study analyzes the application of global values and norms—such as public safety, human rights, and accountability—through the Penta-Helix model, which involves the roles of government, academia, society, media, and the private sector. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through literature studies of official reports, international regulations, academic publications, and media coverage. The findings reveal that although global norms have been formally adopted, their implementation at the national level faces significant challenges, including weak coordination among stakeholders, inconsistent regulatory enforcement, and low accountability. This tragedy not only exposed domestic governance failures but also damaged Indonesia's international reputation, particularly in sports diplomacy. The study concludes that integrating global values into local policies through inclusive and transparent Penta-Helix collaboration is an urgent necessity. Policy recommendations focus on strengthening regulatory frameworks, enhancing stakeholder capacity, and reforming disaster governance in alignment with international standards to prevent similar tragedies in the future.

PENDAHULUAN

Pengelolaan bencana non-alam menjadi perhatian utama di era globalisasi, karena dampaknya yang kompleks dan sering kali melintasi batas negara. Pergeseran fokus dari bencana alam ke bencana non-alam menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan tata kelola bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Rizqillah, 2019; Yuda et al., 2023). Salah satu peristiwa yang menggambarkan kompleksitas ini adalah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, yang menewaskan 135 orang akibat pelanggaran protokol

keselamatan, lemahnya akuntabilitas, dan buruknya manajemen stadion (Amnesty International Indonesia, 2022). Peristiwa ini mengungkap kegagalan sistemik dalam pengelolaan risiko bencana non-alam di Indonesia dan menimbulkan pertanyaan tentang penerapan nilai dan norma global seperti keselamatan publik, hak asasi manusia, dan akuntabilitas (UNDRR, 2015).

Tragedi Kanjuruhan memiliki kesamaan dengan Tragedi Hillsborough di Inggris pada tahun 1989, di mana pelanggaran protokol keselamatan stadion menyebabkan korban jiwa dan trauma mendalam. Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya regulasi keselamatan yang kuat dan investigasi transparan sebagai langkah pencegahan (Cristea & Schulz, 2016; Layliyah N., 2019; Madjid & Akbar, 2023; Najicha & Septi, 2022; Utama et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, pendekatan multistakeholder seperti model penta-helix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan sektor swasta, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas respons terhadap bencana non-alam (Sudiana et al., 2020; Umiyati & Tamrin, 2021).

Pendekatan ini sejalan dengan kerangka kerja internasional seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030), yang menekankan pentingnya partisipasi multipihak untuk mengurangi risiko bencana (UNDRR, 2015). Selain itu, prinsip-prinsip dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) dan regulasi FIFA menggarisbawahi kewajiban moral dan hukum untuk melindungi keselamatan publik dan menegakkan akuntabilitas (FIFA, 2022). Namun, implementasi nilai-nilai ini sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi, kepentingan politik, dan budaya impunitas, seperti yang terlihat dalam Tragedi Kanjuruhan (Pebrianto, 2022).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji model penta-helix dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inovasi daerah, dan penanganan bencana alam (Amrial et al., 2017; Herliana, 2015; Priyo Purnomo et al., 2021). Studi-studi lain fokus pada aspek hukum dan hak asasi manusia dalam Tragedi Kanjuruhan (Nadhillah & Lubis, 2023; Utama et al., 2022), serta analisis kebijakan mitigasi bencana sosial (Dirkareshza & Yudha Prawira, 2022; Nugraha et al., 2023; Zainuddin & Satispi, 2023). Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif hubungan internasional—dengan menitikberatkan pada penerapan nilai dan norma global—ke dalam analisis model penta-helix untuk menanggapi bencana non-alam di sektor olahraga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk menyinergikan konsep nilai dan norma global (seperti yang diatur dalam kerangka Sendai dan regulasi FIFA) dengan model penta-helix dalam menganalisis respons terhadap bencana non-alam, khususnya melalui studi kasus Tragedi Kanjuruhan. Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas tata kelola domestik, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap reputasi internasional Indonesia, khususnya dalam diplomasi olahraga—aspek yang masih jarang diteliti secara mendalam.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model penta-helix dalam merespons Tragedi Kanjuruhan, dengan fokus pada integrasi nilai dan norma global dalam tata kelola lokal. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengelolaan bencana di Indonesia serta meningkatkan reputasi internasional negara dalam konteks hubungan internasional. Manfaat penelitian diharapkan

dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur tentang tata kelola bencana non-alam dan hubungan internasional, serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan integrasi nilai global dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia.

Pengelolaan bencana non-alam telah menjadi perhatian global, khususnya dalam konteks penerapan nilai dan norma internasional seperti keselamatan publik, hak asasi manusia, dan akuntabilitas. Studi-studi sebelumnya memberikan landasan penting untuk memahami kompleksitas pengelolaan bencana non-alam dan relevansi pendekatan multistakeholder.

Model penta-helix merupakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima aktor utama: pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan sektor swasta. Sudiana et al. (2020) menekankan bahwa model ini memungkinkan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi isu sosial dan ekonomi, termasuk pengelolaan bencana non-alam. Dalam konteks ini, setiap aktor memiliki peran unik, seperti pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai penyedia riset berbasis bukti, dan media sebagai penghubung informasi. Pendekatan ini juga terbukti efektif dalam program-program seperti deradikalialisasi terorisme dan mitigasi bencana, di mana kolaborasi multipihak meningkatkan efektivitas respons (Subagyo, 2021).

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030) menekankan pentingnya partisipasi multipihak dalam pengelolaan risiko bencana. Kerangka ini menyoroti empat prioritas, termasuk peningkatan tata kelola risiko bencana dan penguatan investasi dalam manajemen risiko (UNDRR, 2015). Selain itu, regulasi FIFA terkait keselamatan stadion menegaskan pentingnya protokol keamanan yang ketat, seperti kapasitas stadion yang memadai dan pelatihan bagi petugas keamanan (FIFA, 2022). Namun, implementasi nilai-nilai ini seringkali menghadapi tantangan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kelemahan dalam penegakan regulasi menjadi hambatan utama (Utama et al., 2022).

Tragedi Kanjuruhan mengungkap kelemahan struktural dalam tata kelola bencana di Indonesia. Amnesty International Indonesia (2022) menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, termasuk penggunaan gas air mata yang bertentangan dengan regulasi internasional. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap norma global dan minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan bencana. Utama et al. (2022) menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang dan kegagalan dalam mengikuti prosedur administrasi merupakan faktor utama yang memperburuk dampak tragedi tersebut.

Studi kasus Hillsborough di Inggris pada tahun 1989 menjadi referensi penting dalam memahami kegagalan pengelolaan bencana non-alam. Renn dan Schweizer (2009) mencatat bahwa peristiwa ini mendorong reformasi besar-besaran dalam regulasi keselamatan stadion di Inggris, termasuk penekanan pada transparansi dan akuntabilitas. Pengalaman ini relevan dengan konteks Tragedi Kanjuruhan, di mana pelanggaran serupa terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya pelatihan bagi aparat keamanan.

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penelitian ini berupaya mengintegrasikan pendekatan penta-helix dengan norma global dalam pengelolaan bencana non-alam. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan tata kelola bencana dan memperbaiki reputasi internasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus Tragedi Kanjuruhan sebagai bencana non-alam dalam konteks olahraga. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai penerapan nilai dan norma global melalui model penta-helix. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran masing-masing dari lima aktor utama dalam model penta-helix, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media, dalam merespons Tragedi Kanjuruhan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi laporan resmi dari pemerintah, FIFA, dan Amnesty International terkait Tragedi Kanjuruhan; publikasi akademis seperti artikel jurnal dan buku yang relevan dengan model penta-helix, pengelolaan bencana, dan norma global; serta berita media dari platform nasional dan internasional yang memberikan konteks kronologis dan menggambarkan respons para pemangku kepentingan terhadap tragedi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen resmi, regulasi, dan publikasi akademis, serta analisis berita media yang membahas peristiwa, dampak, dan respons terkait Tragedi Kanjuruhan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan sesuai fokus penelitian. Kedua, kategorisasi data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan lima aktor dalam model penta-helix dan nilai global yang diterapkan. Ketiga, interpretasi data dilakukan secara mendalam untuk menganalisis keterlibatan masing-masing aktor, kesenjangan antara standar global dan praktik lokal, serta dampaknya terhadap reputasi internasional Indonesia. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti laporan resmi, publikasi akademis, dan berita media untuk memastikan konsistensi. Selain itu, kredibilitas data dijaga dengan menggunakan referensi yang terpercaya dan diakui secara akademis, serta konfirmasi data dengan membandingkan hasil analisis dengan literatur dan studi sebelumnya untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model penta-helix dalam merespons Tragedi Kanjuruhan belum optimal. Pemerintah, sebagai regulator utama, gagal memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional seperti regulasi FIFA. Misalnya, penggunaan gas air mata di stadion yang menjadi penyebab utama tingginya korban jiwa bertentangan dengan aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di stadion olahraga (FIFA, 2022; Amnesty International Indonesia, 2022). Selain itu, akademisi belum memainkan peran signifikan dalam memberikan rekomendasi berbasis riset untuk meningkatkan pengelolaan risiko.

Sektor swasta, terutama pengelola stadion, juga belum menunjukkan komitmen terhadap standar keselamatan, seperti kapasitas stadion yang sesuai dan jalur evakuasi yang memadai. Keterlibatan masyarakat, yang seharusnya berperan sebagai pengawas dan partisipan aktif, lebih menonjol dalam advokasi keadilan pascatragedi dibandingkan upaya pencegahan. Media, meskipun berperan penting dalam mengungkap fakta tragedi dan mendorong akuntabilitas, sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga objektivitas di tengah politisasi isu (Pebrianto, 2022).

Tragedi ini mencerminkan kegagalan penerapan nilai dan norma global. Dalam hal keselamatan publik, pelanggaran seperti kurangnya pelatihan aparat keamanan dan

ketidaksesuaian fasilitas stadion dengan standar internasional menjadi sorotan utama (FIFA, 2022). Amnesty International mencatat adanya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindakan represif aparat yang menewaskan banyak korban (Amnesty International Indonesia, 2022). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam investigasi pascatragedi semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Meskipun nilai global seperti yang diatur dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dan regulasi FIFA telah menjadi pedoman internasional, penerapannya di Indonesia masih terbatas pada tingkat normatif dan belum terintegrasi dengan baik ke dalam praktik lokal (UNDRR, 2015).

Tragedi Kanjuruhan memberikan dampak signifikan terhadap reputasi internasional Indonesia, terutama dalam diplomasi olahraga. Kritik dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan FIFA menunjukkan kegagalan Indonesia dalam memenuhi komitmen terhadap standar keselamatan dan HAM. Selain itu, tragedi ini merusak kredibilitas Indonesia sebagai tuan rumah yang layak untuk acara olahraga internasional, seperti Piala Dunia U-20 yang semula dijadwalkan di Indonesia (Utama et al., 2022).

Penelitian ini menemukan kesenjangan yang signifikan antara standar global dan implementasi lokal dalam pengelolaan bencana non-alam. Koordinasi antaraktor dalam model penta-helix masih lemah, dan setiap aktor cenderung bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang optimal. Hal ini kontras dengan pengalaman internasional seperti Tragedi Hillsborough, di mana kegagalan serupa mendorong reformasi menyeluruh dalam regulasi keselamatan stadion di Inggris (Renn & Schweizer, 2009).

Pendekatan penta-helix memiliki potensi besar untuk memperbaiki tata kelola bencana non-alam. Pemerintah perlu memperkuat peran regulasi dan pengawasan, akademisi dapat memberikan kontribusi melalui riset berbasis bukti, sektor swasta harus berinvestasi dalam fasilitas yang aman, sementara media dan masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan mendorong transparansi. Reformasi menyeluruh yang berbasis kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mencegah tragedi serupa dan memulihkan reputasi internasional Indonesia

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Tragedi Kanjuruhan memberikan pelajaran berharga bahwa penanganan bencana non-alam memerlukan keterlibatan aktif berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, aparat keamanan, media, masyarakat, dan organisasi olahraga, dimana setiap pihak memainkan peran signifikan dalam pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Tragedi ini juga menguatkan pentingnya penerapan nilai dan norma global seperti keselamatan publik, hak asasi manusia, dan akuntabilitas dalam tata kelola kebencanaan, khususnya dalam konteks hubungan internasional dan dunia olahraga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang ada dapat berakibat fatal, sehingga diperlukan kebijakan publik yang jelas dan efektif dalam mitigasi bencana. Peran media dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi yang akurat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, menjadi elemen kunci dalam pengawasan dan transparansi. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan semua stakeholder mutlak diperlukan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa

dengan, sekaligus memastikan keselamatan publik dan menjaga martabat manusia sebagai tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2022, Oktober 1). *Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang*. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>
- Amrial, A., Muhamad, E., & Adrian, A. M. (2017). Penta helix model: A sustainable development solution through the industrial sector. *Social and Human Sciences*, 14(1), 152–156.
- Cristea, A., & Schulz, N. D. (2016). Penyalahgunaan wewenang administrasi negara dalam birokrasi Indonesia. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(August).
- Dirkareshza, R., & Yudha Prawira, M. R. (2022). Legal liability of the parties to the tragedy of the match at Kanjuruhan Stadium Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.28803>
- Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (2022). *FIFA stadium safety and security regulations*. FIFA. <https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf>
- Herliana, S. (2015). Regional innovation cluster for small and medium enterprises (SME): A triple helix concept. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169, 151–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.298>
- Layliyah, N. (2019). Wewenang dalam hukum administrasi negara. *Public Administration*, 10(October).
- Madjid, M. A. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan wewenang dalam instrumen hukum administrasi negara. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(2). <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268>
- Nadhilla, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas HAM dalam tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 90–109. <https://doi.org/10.24252/ad.v12i1.41419>
- Najicha, F. U., & Septi, M. S. A. (2022). Peninjauan hukum administrasi negara dalam penyalahgunaan wewenang barang/jasa pemerintah. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3).
- Nugraha, N. A., Ferdihansyah, R. H. A., & Fauzi, C. M. A. N. (2023). Tragedy of Kanjuruhan Stadium seen from perspective of human rights. *Jurnal Setia Pancasila*, 4(1). <https://doi.org/10.36379/jsp.v4i1.397>
- Pebrianto, F. (2022, Oktober 14). Kesimpulan TGIPF: Gas air mata penyebab utama kematian di Tragedi Kanjuruhan. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/kesimpulan-tgipf-gas-air-mata-penyebab-utama-kematian-di-tragedi-kanjuruhan-273956>
- Priyo Purnomo, E., Aditya, F., Fathani, A. T., Salsabila, L., & Rachmawatie, D. (2021, Agustus). Penta-Helix approach as a strategy to recovery tourism in Bali due to Covid-19 pandemic. In *Proceedings of the 11th International Conference on Information*

Communication and Management (pp. 122–127).
<https://doi.org/10.1145/3481056.3481113>

Renn, O., & Schweizer, P.-J. (2009). Inclusive risk governance: Concepts and application to environmental policy making. *Environmental Policy and Governance*, 19(3), 174–185.
<https://doi.org/10.1002/eet.507>

Rizqillah, A. F. (2019). Disaster preparedness: Survey study pada mahasiswa keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. *Medisains*, 16(3).
<https://doi.org/10.30595/medisains.v16i3.3120>

Sudiana, K., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The development and validation of the Penta Helix construct. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145.
<https://doi.org/10.3846/btp.2020.11109>

Subagyo, H. (2021). Deradikalisasi berbasis penta helix dalam penanggulangan terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 85–99.

Umiyati, S., & Tamrin, M. H. (2021). Penta helix synergy in halal tourism development. In *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities* (pp. 563–567). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.108>

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. UNDRR. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., Saraswati, R., & Putrijanti, A. (2022). Tragedi Kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan prosedur administrasi negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 414–421. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.414-421>

Yuda, H. F., Amri, M. A., Nuryana, S. D., Sulastri, M., Triany, N., Apriniyadi, M., & Syahadun, S. (2023). Aspek geologi lingkungan dalam rangka pemekaran wilayah administrasi, dalam pembangunan ibu kota Kabupaten Bogor Barat. *Jurnal Geografi*, 12(2). <https://doi.org/10.24036/geografi/vol12-iss2/3570>

Zainuddin, H., & Satispi, E. (2023). Disaster mitigation in tragedy of Malang Kanjuruhan Stadium: Study on policies in social crime disaster. *The Social Perspective Journal*, 2(2).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).